



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Meskipun demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Sangatta, 13 Januari 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah



NOVIARI NOOR, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19671108 200212 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	I-2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	I-2
1.2.2 Data Pegawai	I-5
1.2.3 Anggaran	I-7
1.3 Dasar Hukum	I-7
1.4 Sistematis Laporan Kinerja	I-7
BAB II	II-1
PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	II-1
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	II-3
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-4
BAB III	III-1
AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja	III-1
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	III-2
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	III-2
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	III-4
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	III-7
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	III-8
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	III-9
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	III-15
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-17



3.2 Realisasi Anggaran	III-42
3.2.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah		III-55
BAB IV	IV-1
PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	LAMP-i



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Timur.....	I-6
Tabel 1.2	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	I-7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	II-2
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024 Bappeda	II-3
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bappeda.....	II-5
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024	II-5
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	III-2
Tabel 3.2	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024	III-3
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja	III-4
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	III-7
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	III-8
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	III-9
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	III-15
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	III-17
Tabel 3.10	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-42
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi I-4

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi



kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

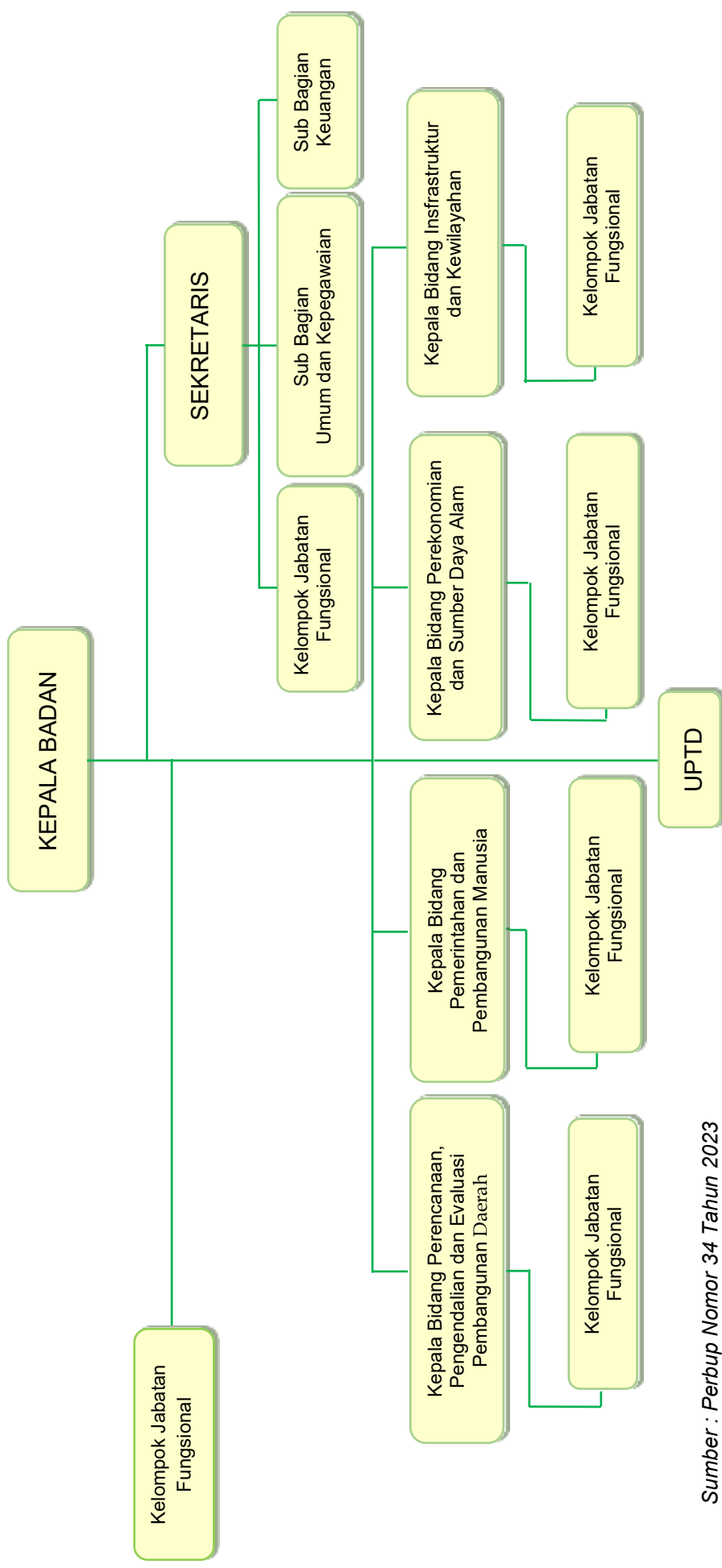


- Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan;
- Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan BAPPEDA;
- Membina kelompok jabatan fungsional;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- Melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Perbup Nomor 34 Tahun 2023



1.2.2 Data Pegawai

Secara umum jumlah pegawai PNS, P3K dan TK2D di Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 berjumlah 103 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 57 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 7 orang dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 39 orang. Gambaran komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2.



Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan ASN				Golongan PPPK			Pendidikan				
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	IX	VIII	S 2	S 1	D 3	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan	1		1						1					
Sekretaris	1 (Pit)		1							1				
Kepala Sub Bagian		2		2					2					
Kepala Bidang	4		4						3	1				
Perencana Ahli Muda	7	5	2	10					6	6				
Perencana Ahli Pertama	1	2		3					1	2				
Ahli Pertama – Pranata Komputer	1			1						1				
Jumlah ASN Pelaksana	15	19		32	1	1			3	26	1	3		1
Perencana Ahli Pertama (PPPK)	4	1					5			5				
Statistisi Ahli Pertama (PPPK)		1					1			1				
Terampil – Arsiparis (PPPK)		1						1			1			
Jumlah TK2D	14	25							2	26		11		
Total ASN+PPPK+TK2D	103 (PNS+PPPK+TK2D)		57 (PNS)		7 (PPPK)		103 (PNS+PPPK+TK2D)							

Sumber : Data Pegawai Bappeda Tahun 2024



1.2.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2023	Rp. 47.620.941.573,-
APBD	2024	Rp. 54.238.171.428,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah :



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik			Nilai SAKIP	-	-	-	73	74
		1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	-	-	100%	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	84.55%	85.55%	86.55%	100%	100%
		1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah.	Persentase capaian evaluasi LAKIP	75.00%	80.00%	85.00%	-	-
		1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	80.00%	87.00%	89.00%	100%	100%
		1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian	Konsistensi Penjabaran RPJMD	83.55%	84.55%	85.55%	100%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	terhadap Renstra Perangkat Daerah					

Sumber : Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	1.4.1#0.1	Nilai SAKIP	-	Ketercapaian dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat Kab. Kutai Timur	Bappeda
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	1.4.1.1#0.1	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	prosentase	Ketercapaian kegiatan yang terealisasi pada program penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Target Kegiatan yang Terealisasi dibagi dengan Jumlah Target Kegiatan dikalikan 100 %	Bappeda
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	prosentase	Keselarasn antara jumlah program dalam RKPD dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen RKPD) : Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD) x 100%	Bappeda



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	1.4.2.1#0.1	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	prosentase	Keselarasan antara jumlah program dalam RKPD dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen RKPD) : (Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD) x 100%	Bappeda
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	1.4.2.2#0.1	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	prosentase	Keselarasan antara jumlah program dalam Renstra dan Renja dengan Jumlah program pada RPJMD dan RKPD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen Renstra dan Renja Seluruh PD Tahun n) : (Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD Tahun n) x 100%	Bappeda

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan			Nilai SAKIP	-	73



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan yang Baik				
		1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	prosentase 100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	prosentase 100%
		1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	prosentase 100%
		1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	prosentase 100%

Sumber : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	73
	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	100%
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100 %	28,644,312,043



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100 %	580,551,640
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300,366,640
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	86,050,000
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	46,595,000
1.4.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,140,000
1.4.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,140,000
1.4.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	60,367,000
1.4.2.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	72,893,000
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan	100 %	16,811,869,309



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Honorer serta laporan Keuangan		
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	13,789,976,989
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,808,255,115
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	749,999,655
1.4.2.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen	300,000,000
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	100,000,000
1.4.2.1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	70 Dokumen	36,871,838
1.4.2.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	26,765,712
1.4.2.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD	100 %	96,598,962



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90,000,000
1.4.2.1.1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6,598,962
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100 %	3,591,228,500
1.4.2.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	725,440,500
1.4.2.1.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	79 Orang	765,788,000
1.4.2.1.1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	113 Orang	2,100,000,000
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	4,790,940,711
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	15 Paket	201,010,290
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2,079,125,128
1.4.2.1.1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	217,586,253
1.4.2.1.1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	504,189,455
1.4.2.1.1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	5 Paket	119,871,510



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penggandaan yang Disediakan		
1.4.2.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1,270,039,500
1.4.2.1.1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	399,118,575
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100 %	644,280,000
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	351,840,000
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	292,440,000
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100 %	2,128,842,921
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	677,756,640
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	224,332,500
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	1,226,753,781
1.4.2.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	14,764,061,586



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100 %	9,954,444,937
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	2,502,550,796
1.4.2.2.1.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	176,326,807
1.4.2.2.1.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	618,792,930
1.4.2.2.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	36,604,000
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	363,333,900
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2.820 Usulan	95,110,000
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	6,161,726,504
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100 %	1,916,698,000
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	2 Dokumen	1,691,585,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan Daerah)		
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	222 Orang	225,113,000
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ	100 %	2,283,361,624
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	877,341,344
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Lapooran	1,406,020,280
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah	100 %	609,557,025
1.4.2.2.1.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	257,263,620
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	167,853,000
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	184,440,405



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	100 %	10,829,797,799
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	2,674,982,610
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	270,403,620.00
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	147,752,250.00
1.4.2.3.1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	198,162,250.00
1.4.2.3.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	148,201,800.00
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	720,933,540.00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	290,491,350.00
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	214,951,800.00
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	684,086,000.00
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	2,655,308,025
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	399,999,834
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Laporan	199,999,576



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	249,999,935
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	499,999,790
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	605,309,429
1.4.2.3.1.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	199,999,724
1.4.2.3.1.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	299,999,825
1.4.2.3.1.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	1 Laporan	199,999,912



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5,499,507,164
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	804,850,800
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	433,050,000
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	943,266,364
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	493,706,000
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	479,608,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2,100,000,000
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	50,000,000
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	195,026,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 2 (Dua) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis Bappeda semuanya mencapai target yang telah ditentukan sebagai berikut :
 - I. Tujuan I : Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik dengan indikator nilai SAKIP realisasi kinerja 66 (baik) dengan capaian kinerja 90.41%.
 1. Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi).
 - II. Tujuan II : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD capaian kinerja sebesar 99.32% (Sangat Tinggi).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Predikat
1	Sangat Memuaskan	AA (Nilai > 90 – 100)
2	Memuaskan	A (Nilai > 80 – 90)
3	Sangat Baik	BB (Nilai > 70 – 80)
4	Baik	B (Nilai > 60 – 70)
5	Cukup (Memadai)	CC (Nilai > 50 – 60)
6	Kurang	C (Nilai > 30 – 50)
7	Sangat Kurang	D (> 0 – 30)

Sumber: Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	73	66	90.41	Baik	Bappeda
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%	99.32%	99.32%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	100%	99.32%	99.32%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bappeda

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Berdasarkan data yang disajikan di atas, terdapat capaian kinerja Bappeda yang belum memenuhi target yaitu :



- Tujuan I Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip dengan target 73 dan realisasi kinerja 66 (sesuai dengan hasil LHE AKIP tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur terlampir) dengan kategori Baik;
- Tujuan II Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD dengan target sebesar 100 % dan realisasi kinerja 99.32% dengan capaian kinerja 99.32%. Dari tiga sasaran strategis satu sasaran strategis belum mencapai target yaitu Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang mempunyai target 100 % dan realisasi kinerja 99.32% dengan capaian kinerja 99.32%. (sangat tinggi)

Dengan demikian, secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	-	-	-	73	66	90.41



1.4.1.1	Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik.	Persentase capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	-	-	100%	100%	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	80.00%	93.75%	98.97%	100%	99.32%	99.32%
1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah.	Persentase capaian evaluasi LAKIP	84.98%	100%	100%	-	-	-
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	98.75%	99.66%	98.97%	100%	99.32%	99.32%
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	93.15%	100%	100%	100	100%	100%

Berdasarkan data yang disajikan di atas, perkembangan kinerja secara umum meningkat yaitu :

- Tujuan I Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip, tahun 2021- 2023 tujuan tersebut belum menjadi indikator tujuan Bappeda, setelah dilakukan revisi Renstra Bappeda pada tahun 2023 indikator Nilai Sakip menjadi indikator tujuan Bappeda dan dilaksanakan pada perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan adapun realisasi kinerja Tata Kelola Kebijakan Urusan



Perencanaan yang Baik dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip dan target 73 dengan realisasi kinerja sebesar 66 (berdasarkan hasil LHE AKIP tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur terlampir). Pada tujuan I memiliki 1 sasaran yaitu Administasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator persentase capaian Tata Kelola Administasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan target 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%

- Tujuan II Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD, dari tahun 2021-2023 realisasi capaian target kinerja mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 9.5%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.35% meskipun mengalami penurunan capaian kinerja tahun 2024 masih berada dalam kategori sangat tinggi (99, 32%). Pada tujuan II tahun 2021-2023 memiliki tiga sasaran dan setelah dilakukan revisi Renstra pada tahun 2024 terdapat dua sasaran. sasaran tersebut adalah :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase capaian evaluasi LAKIP, dari tahun 2021-2023 capaian kinerja dari 84,98% menjadi 100% setelah dilakukan revisi Renstra Bappeda terhitung 2024 indikator tersebut tidak dipakai;
 - b. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah jika realisasi capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2021 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0.46% akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 0.34% akan tetapi capaian kinerja tahun 2024 masih masuk dalam kategori sangat tinggi;
 - c. Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah, jika



dibandingkan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2022 dan 2023 adalah sama yaitu 100% akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6.85%.

Secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	73	75	90.41%
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	99.32%	100%	99.32%
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	99.32%	100%	99.32%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dijelaskan bawah pada pelaksanaan tahun ke tiga Rencana Strategis Bappeda dari 3 (tiga) indikator kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dan Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah, telah memenuhi target kinerja Renstra dan secara capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100%). Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah belum memenuhi target kinerja Renstra dan secara capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (99.32%).

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	90.41%	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	-	-
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPd	99.32%	-	-
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	99.32%	-	-
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	-	-

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	73	66	90.41%	Realisasi kinerja belum memenuhi target	
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi	Persentase Capaian Tata	100%	100%	100%	Realisasi kinerja berhasil	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan				memenuhi target	
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%	99.32%	99.32%	Realisasi kinerja belum memenuhi target	
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	100%	99.32%	99.32%	Realisasi kinerja belum memenuhi target	
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Realisasi kinerja berhasil memenuhi target	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa dari dua tujuan semua belum mencapai target indikator kinerja, meskipun dua tujuan tersebut belum mencapai target indikator kinerja akan tetapi realisasi indikator kinerja masuk dalam kriteria baik (66) dan sangat tinggi (99.32%). Dari tiga indikator kinerja sasaran strategis terdapat dua target indikator kinerja sasaran strategis yang telah tercapai dengan kategori sangat tinggi (100%) dan satu indikator sasaran strategis yang belum mencapai target akan tetapi capaian kinerja masuk dalam kriteria sangat tinggi (99.32%). Analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tujuan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik

Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator kinerja Persentase capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan definisi Ketercapaian kegiatan yang terealisasi pada program penunjang urusan pemerintah daerah. Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja



berhasil yaitu dengan capaian 100%, beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan antara lain :

- Adanya pergantian Sekretaris dan Plt. Sekretaris sehingga mempengaruhi proses penetapan SK KPA.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan / mempertahankan realisasi target dan perbaikan yang akan datang antara lain :

- Koordinasi ke BKPSDM dan Bagian Hukum untuk percepatan penetapan SK Plt. Sekretaris dan SK KPA;
- Sekretariat (sub bagian keuangan) lebih intensif melakukan pendampingan kepada bidang-bidang

Tujuan II : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran I : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dengan definisi Keselarasan antara jumlah program dalam RKPD tahun 2024 dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke tiga (2024). Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian



kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah belum memenuhi target akan tetapi masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu tercapai 99.32% dengan realisasi 99.32%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tepat waktu;
- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
- Melakukan sosialisasi kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada Kepala Desa, Kecamatan dan DPRD;
- Melakukan pendampingan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dengan memberikan pendampingan Kepada Desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
- Program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026;
- Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD.

Sasaran II : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan definisi keselarasan antara jumlah program dalam Renstra dan Renja dengan Jumlah program dalam RPJMD dan RKPD. Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah tercapai sebesar 100% dengan realisasi 100%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah :



- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2025 dan Perubahan Renja tahun 2024 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan.

Dalam mewujudkan sasaran I : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dan sasaran II : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain :

- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat beradaptasi dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;



- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;
- Tahun 2024 pertama kali penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD RI sehingga memerlukan adaptasi.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;



- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD:
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;
- Percepatan adaptasi penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD dengan berkoordinasi ke BPKAD dan pelaksanaan pelatihan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	73	66	90.41%	28,644,312,043	22,872,672,835	79.85%	1.25
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	100%	100%	100%	28,644,312,043	22,872,672,835	79.85%	1.25
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	99.32%	99.32%	25,593,859,385	21,927,094,849	85.53%	1.16
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	100%	99.32%	99.32%	14,764,061,586	12,765,093,040	86.46%	1.15



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	100%	100%	100%	10,829,797,799	9,162,001,809	84.60%	1.18

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

- I. Tujuan I : Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik capaian kinerja dengan nilai 66 (baik) dan capaian anggaran sebesar 79.85% efisiensi sebesar 1.13.
 1. Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 79.85% efisiensi sebesar 1.25.
- II. Tujuan II : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 99.32% dan capaian anggaran sebesar 85.53% efisiensi sebesar 1.16.
 1. Sasaran : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 86.46% efisiensi sebesar 1.15.
 2. Sasaran : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 84.60 % efisiensi sebesar 1.18.

Secara keseluruhan untuk pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Bappeda telah melakukan efisiensi antara 1.13 - 1.25.



3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :



Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	90.41			90.41	Menunjang	
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Tahapan penyusunan perencanaan menggunakan aplikasi SIPD



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan RKA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koordinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.1.1.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan Perubahan RKA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koordinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.1.1.1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan RKA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koordinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.1.1.1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan Perubahan RKA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koordinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.1.1.1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan melakukan koordinasi dengan bidang-bidang diinternal Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.4.1.1.1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin setiap triwulan dengan menggunakan aplikasi evdoren dan berkoordinasi dengan bidang-bidang diinternal Bappeda terkait kendala-kendala yang ada.
1.4.1.1.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror serta laporan Keuangan	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Gaji ASN dan tunjangan terbayarkan sesuai dengan regulasi.
1.4.1.1.1.2.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan Gaji TK2D terbayarkan sesuai dengan regulasi
1.4.1.1.1.2.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Bagian Keuangan melakukan koordinasi Ke BPKAD dan dengan bidang-bidang dan selalu memberikan himbauan agar tertib dalam administrasi



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.2.4				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Akuntansi SKPD
1.4.1.1.1.2.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD
1.4.1.1.1.2.6				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, upaya yang telah dilakukan adalah mengarahkan kepada staf untuk tertib dalam penyimpanan arsip SPJ
1.4.1.1.1.2.7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD untuk realisasi semester 1 dan semester 2.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.3.1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . Dokumen RKBMD tersusun sesuai dengan usulan-usualan dari bidang-bidang di Bappeda
1.4.1.1.1.3.2				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan dokumen penatausahaan BMD tersusun dan terus diupdate sesuai dengan kondisi existing BMD
1.4.1.1.1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.4.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakaian dinas telah dibagikan kepada aparatur di Bappeda
1.4.1.1.1.4.2				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, Pelayanan yang diberikan antara lain pengurusan Cuti, Pensiun, KGB, Kenaikan Pangkat, proses ASN untuk mengikuti uji kompetensi Fungsional perencana dan pelatihan, SKP



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.4.3				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelatihan telah di ikuti ASN di Bappeda sesuai dengan tupoksi. Pelatihan diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama dari UGM dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik dari UGM, PPKK UGM dan Lembaga pelatihan lainnya
1.4.1.1.1.4.4				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Aparatur dibappeda telah mengikuti bimtek Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, Jabatan Fungsional Perencana, Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kompetensi aparatur berkaitan dengan kepegawaian
1.4.1.1.1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor terealisasi sesuai dengan yang direncanakan
1.4.1.1.1.5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor telah terlaksana sehingga dapat mendukung kinerja organisasi



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.5.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.1.1.1.5.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.1.1.1.5.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Barang cetak dan penggandaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas penyediaan barang cetak dan penggandaan serta administrasi perkantoran lainnya
1.4.1.1.1.5.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rapat koordinasi untuk mendukung kinerja Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan
1.4.1.1.1.5.7				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengarsipan dokumen-dokumen di Bappeda terus mengalami perbaikan-perbaikan
1.4.1.1.1.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasi kantor	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . penyediaan jasa



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			komunikasi, air dan listrik untuk mendukung kelancaran Bappeda menjalankan tugas dan fungsinya
1.4.1.1.1.6.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . jasa pelayanan umum kantor meliputi cleaning service, penjaga malam dan tukang taman
1.4.1.1.1.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan sesuai dengan rencana sehingga kendaraan dinas dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda
1.4.1.1.1.7.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana sehingga peralatan dan mesin lainnya dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda
1.4.1.1.1.7.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rehab gedung dilakukan untuk bagian-bagian gedung yang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					yang Dipelihara/Direhabilitasi			mengalami kerusakan dengan tujuan untuk mendukung kinerja organisasi
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%			100%	Menunjang	
1.4.2.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	99.32%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	99.32%	Menunjang	
1.4.2.2.1.1				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.1.1				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan ketersediaan data pendukung untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan .
1.4.2.2.1.1.2				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, forum perangkat daerah



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Daerah/Lintas Perangkat Daerah			/ lintas perangkat daerah telah dilaksanakan untuk penyusunan RKPD 2025
1.4.2.2.1.1.3				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan
1.4.2.2.1.1.4				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk penyusunan dokumen RKPD dan RPJPD
1.4.2.2.1.1.5				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Musrenbang Kabupaten telah dilaksanakan untuk pembahasan RKPD 2025 dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2025
1.4.2.2.1.1.6				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100%	Menunjang	Tahun 2024 telah dilakukan pendampingan kepada desa terkait usulan-usulan desa yang sesuai dengan kamus usulan dan permasalahan yang ada di setiap desa dan selanjutnya diinput dalam aplikasi SIPD
1.4.2.2.1.1.7				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJ MD/RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan terjadi kesalahan dalam menentukan target. Meskipun realisasi tidak mencapai target akan tetapi kinerja dari sub kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu pengesahan dokumen RKPD 2025, RPJPD dan Perubahan RKPD 2024.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.2.1.2				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.2.1				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dilakukannya penyampaian kebutuhan data dan rekon data-data pendukung perencanaan pembangunan
1.4.2.2.1.2.2				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan telah dilaksanakan pembinaan terhadap aparatur perencana di PD untuk memndukung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
1.4.2.2.1.3				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.3.1				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.2.1.3.2				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Monitoring evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Evdoren
1.4.2.2.1.4				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada Penyusunan Perencanaan Daerah	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.4.1				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.2.2.1.4.2				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahap perencanaan dan penganggaran telah menggunakan aplikasi SIPD
1.4.2.2.1.4.3				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pembinaan kepada perangkat daerah terkait SIPD telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan di PD



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.1				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.1.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.1.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang pemerintahan telah dilaksanakan untuk semua PD



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.1.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang pemerintahan telah dilaksanakan untuk semua PD
1.4.2.3.1.1.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Pemerintahan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.1.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.1.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.1.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.1.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.2				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.2.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.2.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.2.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.2.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Perekonomian dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.2.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang SDA telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD
1.4.2.3.1.2.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang SDA telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.2.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang SDA telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.2.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang SDA dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.3				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.3.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.3.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.3.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi peyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.3.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Infrastuktur dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.3.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.3.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.3.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi peyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
1.4.2.3.1.3.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang kewilayahan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2024



Berdasarkan dari hasil tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan 7 (Tujuh) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh dua) sub kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan mencapai 100%. Faktor – Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan, pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.

Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- Adanya pergantian Sekretaris dan Plt. Sekretaris sehingga mempengaruhi proses penetapan SK KPA;
- Penatausahaan Keuangan tahun 2024 pertama kali menggunakan aplikasi SIPD sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian.

Solusi yang ditempuh untuk mempertahankan capaian target kinerja/perbaikan kedepan antara lain :

- Setiap terdapat pergantian pejabat segera melakukan koordinasi ke BKPSDM dan Bagian Hukum untuk percepatan penetapan SK Plt. Sekretaris dan SK KPA.



- Sekretariat (sub bagian keuangan) lebih intensif melakukan pendampingan kepada bidang-bidang.
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terdiri atas 4 (Empat) kegiatan dan 14 (Empat Belas) sub kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan mencapai 100%. Akan tetapi dengan adanya penyesuaian-penyesuaian program pada perangkat daerah sehingga terdapat perbedaan antara jumlah program dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Taun 2024 dengan jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Jumlah program dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur sebanyak 293 program sedangkan jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2026 sebanyak 295 program, tetapi capaian program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tetap masuk dalam kategori sangat tinggi. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain :
 - Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan tepat waktu;
 - Berkoordinasi dengan Perangkat daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
 - Melakukan sosialisasi kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada Kepala Desa, Kecamatan dan DPRD;
 - Melakukan pendampingan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dengan memberikan pendampingan Kepada Desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
 - Program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026;



- Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren sehingga mempercepat proses evaluasi;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% didukung dengan pelaksanaan 3 (Tiga) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) sub kegiatan, adapun faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2025 dan Perubahan Renja tahun 2024 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada



Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Selain faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat beradaptasi dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;
- Tahun 2024 pertama kali penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD RI sehingga memerlukan adaptasi.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan / mempertahankan realisasi target antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;



- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;
- Percepatan adaptasi penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD dengan berkoordinasi ke BPKAD dan pelaksanaan pelatihan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,644,312,043	22,872,627,835	79.85
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	580,551,640	544,986,649	93.87
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300,366,640	280,576,831	93.41
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	86,050,000	81,531,558	94.75
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	46,595,000	46,524,480	99.85
1.4.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,140,000	3,120,000	43.70
1.4.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,140,000	5,130,000	71.85
1.4.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,367,000	59,787,280	99.04
1.4.2.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,893,000	68,316,500	93.72
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,811,869,309	14,264,909,343	84.85



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,789,976,989.00	11,860,439,915	86.01
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,808,255,115.00	1,422,768,084	78.68
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	749,999,655.00	646,161,952	86.15
1.4.2.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300,000,000.00	239,901,506	79.97
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000,000.00	56,674,786	56.67
1.4.2.1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36,871,838.00	15,124,000	41.02
1.4.2.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26,765,712.00	23,839,100	89.07
1.4.2.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	96,598,962	51,297,000	53.10
1.4.2.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	90,000,000.00	47,820,000	53.13
1.4.2.1.1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,598,962.00	3,477,000	52.69
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,591,228,500	2,257,410,368	62.86



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	725,440,500.00	146,462,000	20.19
1.4.2.1.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	765,788,000.00	544,295,439	71.08
1.4.2.1.1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,100,000,000.00	1,566,652,929	74.60
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,790,940,711	3,892,034,426	81.24
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	201,010,290	128,464,000	63.91
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,079,125,128	1,799,210,900	86.54
1.4.2.1.1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	217,586,253	198,235,750	91.11
1.4.2.1.1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	504,189,455	342,889,849	68.01
1.4.2.1.1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119,871,510	88,696,500	73.99
1.4.2.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,270,039,500	1,061,195,727	83.56
1.4.2.1.1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	399,118,575	273,341,700	68.49
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644,280,000	530,051,859	82.27
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351,840,000	237,611,859	67.53



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292,440,000	292,440,000	100.00
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,128,842,921	1,331,938,190	62.57
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	677,756,640	315,062,440	46.49
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224,332,500	127,290,750	56.74
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,226,753,781	889,585,000	72.52
1.4.2.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	14,764,061,586	12,765,093,040	86.46
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	9,954,444,937	8,977,272,738	90.18
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2,502,550,796	2,015,277,509	80.53
1.4.2.2.1.1.3	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	176,326,807	126,912,150	71.98



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			
1.4.2.2.1.1.4	Pelaksanaan Konsultasi Publik	618,792,930	600,249,310	97.00
1.4.2.2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36,604,000	32,885,600	89.84
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	363,333,900	326,557,200	89.88
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	95,110,000	90,480,000	95.13
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6,161,726,504	5,784,910,969	93.88
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,916,698,000	1,320,333,712	68.89
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,691,585,000	1,107,709,772	65.48
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	225,113,000	212,623,940	94.45
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	2,283,361,624	1,958,560,939	85.78



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	877,341,344	834,834,942	95.16
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,406,020,280	1,123,725,997	79.92
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	609,557,025	508,925,651	83.49
1.4.2.2.1.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	257,263,620	229,173,700	89.08
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	167,853,000	144,269,451	85.95
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	184,440,405	135,482,500	73.46
1.4.2.3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	10,829,797,799	9,162,001,809	84.60



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PEMBANGUNAN DAERAH			
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,674,982,610	2,178,716,976	81.45
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	270,403,620.00	213,838,052	79.08
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	147,752,250.00	135,794,040	91.91
1.4.2.3.1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	198,162,250.00	160,499,150	80.99
1.4.2.3.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	148,201,800.00	101,781,967	68.68
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	720,933,540.00	551,969,952	76.56



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	290,491,350.00	234,186,378	80.62
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	214,951,800.00	202,645,597	94.27
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	684,086,000.00	578,001,840	84.49
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2,655,308,025	2,251,700,012	84.80
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	399,999,834	330,988,020.00	82.75
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	199,999,576	175,198,020.00	87.60



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah Bidang Perekonomian			
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	249,999,935	198,386,647.00	79.35
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	499,999,790	450,283,100.00	90.06
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	605,309,429	539,517,956.00	89.13
1.4.2.3.1.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	199,999,724	159,269,062.00	79.63
1.4.2.3.1.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	299,999,825	227,914,101.00	75.97
1.4.2.3.1.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	199,999,912	170,143,106.00	85.07



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Daerah Bidang SDA			
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5,499,507,164	4,731,584,821	86.04
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	804,850,800	668,212,266	83.02
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	433,050,000	373,498,281	86.25
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	943,266,364	828,422,364	87.82
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	493,706,000	488,861,419	99.02
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	479,608,000	402,826,183	83.99



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2,100,000,000	1,803,847,066	85.90
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50,000,000	20,694,600	41.39
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	195,026,000	145,222,642	74.46

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan didukung dengan pelaksanaan 3 (Tiga) Program 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 54,238,171,428 (Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44,799,722,684 (Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) Sisa anggaran sebesar Rp. 9,438,448,744 (Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga



Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 82.60%.

Adapun penyebab anggaran tidak dapat 100% terealisasi adalah :

- Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN, Gaji Tk2d dan belanja honorarium direalisasikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan jumlah ASN dan TK2D di Bappeda;
- Anggaran belanja pakai habis seperti ATK, bahan cetak, suvernir/ cendera mata, makan minum rapat dibelanjakan sesuai kebutuhan;
- Anggaran belanja perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan 100% karena Bappeda sebagai koordinator perencanaan sebagian besar perjalanan dinas berdasarkan undangan dari Perangkat Daerah, provinsi dan kementerian sehingga sehingga jika tidak ada undangan maka anggaran perjalanan dinas tidak digunakan;
- Anggaran belanja jasa tenaga ahli dibayarkan sesuai dengan jumlah bulan tenaga ahli bekerja;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan.

Solusi untuk perbaikan kedepan antara lain :

- Dalam tahapan perencanaan Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan / disampaikan kepada Kepala Bappeda;
- Lebih intensif melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi keuangan;
- Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan pagu anggaran perubahan;
- Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan lebih baik dan menjalankan pengadaan-pengadaan terutama belanja modal dengan tepat waktu sesuai jadwal di RUP.



3.2.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur	100 %	99.32	99.32	54,238,171,428	44,799,722,684	82.60	1.22
		73 -	66	66				
1.4.2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur	100 %	100	100	28,644,312,043	22,872,627,835	79.85	1.25
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100	100	580,551,640	544,986,649	93.87	1.07
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	100	300,366,640	280,576,831	93.41	1.07
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1	100	86,050,000	81,531,558	94.75	1.06
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1	100	46,595,000	46,524,480	99.85	1.00



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.4.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	100	7,140,000	3,120,000	43.70	2.29
1.4.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	100	7,140,000	5,130,000	71.85	1.39
1.4.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	100	60,367,000	59,787,280	99.04	1.01
1.4.2.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2	100	72,893,000	68,316,500	93.72	1.07
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100	16,811,869,309	14,264,909,343	84.85	1.18
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	66	100	13,789,976,989	11,860,439,915	86.01	1.16
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1	100	1,808,255,115	1,422,768,084	78.68	1.27
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	80	100	749,999,655	646,161,952	86.15	1.16
1.4.2.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen	72	100	300,000,000	239,901,506	79.97	1.25
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5	100	100,000,000	56,674,786	56.67	1.76
1.4.2.1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	70 Dokumen	70	100	36,871,838	15,124,000	41.02	2.44



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.4.2.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4	100	26,765,712	23,839,100	89.07	1.12
1.4.2.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	100	100	96,598,962	51,297,000	53.10	1.88
1.4.2.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100	90,000,000	47,820,000	53.13	1.88
1.4.2.1.1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	100	6,598,962	3,477,000	52.69	1.90
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	100	3,591,228,500	2,257,410,368	62.86	1.59
1.4.2.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	10	100	725,440,500	146,462,000	20.19	4.95
1.4.2.1.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79 Orang	79	100	765,788,000	544,295,439	71.08	1.41
1.4.2.1.1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	113 Orang	113	100	2,100,000,000	1,566,652,929	74.60	1.34
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100	4,790,940,711	3,892,034,426	81.24	1.23
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	15 Paket	15	100	201,010,290	128,464,000	63.91	1.56



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penerangan Bangunan Kantor							
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	15	100	2,079,125,128	1,799,210,900	86.54	1.16
1.4.2.1.1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	10	100	217,586,253	198,235,750	91.11	1.10
1.4.2.1.1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Paket	25	100	504,189,455	342,889,849	68.01	1.47
1.4.2.1.1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5	100	119,871,510	88,696,500	73.99	1.35
1.4.2.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50	100	1,270,039,500	1,061,195,727	83.56	1.20
1.4.2.1.1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1	100	399,118,575	273,341,700	68.49	1.46
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	100	644,280,000	530,051,859	82.27	1.22
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12	100	351,840,000	237,611,859	67.53	1.48
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2	100	292,440,000	292,440,000	100.00	1.00
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	2,128,842,921	1,331,938,190	62.57	1.60
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	52 Unit	52	100	677,756,640	315,062,440	46.49	2.15



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150 Unit	150	100	224,332,500	127,290,750	56.74	1.76
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4	100	1,226,753,781	889,585,000	72.52	1.38
1.4.2.2.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	99.32	99.32	14,764,061,586	12,765,093,040	86.46	1.16
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %	100	100	9,954,444,937	8,977,272,738	90.18	1.11
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4	100	2,502,550,796	2,015,277,509	80.53	1.24
1.4.2.2.1.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	1	100	176,326,807	126,912,150	71.98	1.39
1.4.2.2.1.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2	100	618,792,930	600,249,310	97.00	1.03
1.4.2.2.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1	100	36,604,000	32,885,600	89.84	1.11



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2	100	363,333,900	326,557,200	89.88	1.11
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2820 Usulan	2820	100	95,110,000	90,480,000	95.13	1.05
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3	100	6,161,726,504	5,784,910,969	93.88	1.07
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	1,916,698,000	1,320,333,712	68.89	1.45
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2	100	1,691,585,000	1,107,709,772	65.48	1.53
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	222 Orang	222	100	225,113,000	212,623,940	94.45	1.06
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	100	2,283,361,624	1,958,560,939	85.78	1.17
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	5 Laporan	5	100	877,341,344	834,834,942	95.16	1.05
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan	5 Lapooran	5	100	1,406,020,280	1,123,725,997	79.92	1.25



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	100	100	609,557,025	508,925,651	83.49	1.20
1.4.2.2.1.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1	100	257,263,620	229,173,700	89.08	1.12
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1	100	167,853,000	144,269,451	85.95	1.16
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	1 Dokumen	1	100	184,440,405	135,482,500	73.46	1.36
1.4.2.3.1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	100	10,829,797,799	9,162,001,809	84.60	1.18
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100	100	2,674,982,610	2,178,716,976	81.45	1.23
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan	3 Dokumen	3	100	270,403,620	213,838,052	79.08	1.26



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD), RPJMD dan RKPD)							
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2	100	147,752,250	135,794,040	91.91	1.09
1.4.2.3.1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1	100	198,162,250	160,499,150	80.99	1.23
1.4.2.3.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1	100	148,201,800	101,781,967	68.68	1.46
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	720,933,540	551,969,952	76.56	1.31
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	2 Laporan	2	100	290,491,350	234,186,378	80.62	1.24



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pembangunan Manusia							
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1	100	214,951,800	202,645,597	94.27	1.06
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2	100	684,086,000	578,001,840	84.49	1.18
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100	100	2,655,308,025	2,251,700,012	84.80	1.18
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	399,999,834	330,988,020	82.75	1.21
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2	100	199,999,576	175,198,020	87.60	1.14
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	1	100	249,999,935	198,386,647	79.35	1.26



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian							
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1	100	499,999,790	450,283,100	90.06	1.11
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	605,309,429	539,517,956	89.13	1.12
1.4.2.3.1.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2	100	199,999,724	159,269,062	79.63	1.26
1.4.2.3.1.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1	100	299,999,825	227,914,101	75.97	1.32
1.4.2.3.1.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1	100	199,999,912	170,143,106	85.07	1.18
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	100 %	100	100	5,499,507,164	4,731,584,821	86.04	1.16



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	dan Kewilayahan							
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	804,850,800	668,212,266	83.02	1.20
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2	100	433,050,000	373,498,281	86.25	1.16
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1	100	943,266,364	828,422,364	87.82	1.14
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1	100	493,706,000	488,861,419	99.02	1.01
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	479,608,000	402,826,183	83.99	1.19
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Laporan	2	100	2,100,000,000	1,803,847,066	85.90	1.16



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1	100	50,000,000	20,694,600	41.39	2.42
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1	100	195,026,000	145,222,642	74.46	1.34

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan, Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 79.85 % efisiensi sebesar 1.25.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta melakukan perubahan anggaran sesuai dengan prioritas pencapaian target dan sesuai dengan kebutuhan;



- Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
 - Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan, pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 99.32% dan capaian anggaran sebesar 86.46% efisiensi sebesar 1.15. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 84.60 % efisiensi sebesar 1.18

Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 84.60 % efisiensi sebesar 1.18 antara lain:

- Bappeda sebagai penanggung jawab atau koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan tepat waktu;
- Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD sehingga mempermudah dalam pemantauan terhadap perangkat daerah dalam tahapan perencanaan;
- Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi baik dengan perangkat daerah maupun pemerintah pusat dan provinsi beberapa kegiatan dilaksanakan secara online sehingga dapat dilakukan penghematan anggaran ;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren sehingga mempercepat waktu dalam melakukan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;



- Bappeda secara rutin melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta melakukan perubahan anggaran untuk pencapaian target program prioritas dan sesuai dengan kebutuhan;
- Dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien Bappeda melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD.



1. Sasaran I : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi dengan indikator Persentase pencapaian pelaksanaan Renja capaian kinerja sebesar 99.32% (Sangat Tinggi);
 2. Sasaran II : Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi).
1. Faktor-faktor pendukung tercapainya sasaran strategis Bappeda adalah :
- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
 - Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata;
 - Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
 - Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2025 dan Perubahan Renja tahun 2024 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematis



- penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tepat waktu;
- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
 - Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
 - Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada DRPD;
 - Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);
 - Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;
 - Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
 - Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD;
 - Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
 - Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bappeda untuk tercapainya tujuan dan sasaran strategis adalah :
- Adanya pergantian Sekretaris dan Plt. Sekretaris sehingga mempengaruhi proses penetapan SK KPA;
 - Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;



- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
 - Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
 - Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;
 - Tahun 2024 pertama kali penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD RI sehingga memerlukan adaptasi.
3. Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54,238,171,428 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 44,799,722,684 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 82,60% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.25%.
4. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Perbaikan ke depan untuk pencapaian target Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota) adalah :
- Dalam tahapan perencanaan Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan/ disampaikan kepada Kepala Bappeda;



- Lebih intensif melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi keuangan;
 - Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksana Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu anggaran perubahan;
- b. Perbaikan kedepan untuk pencapaian target Sasaran Strategis :
Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dan Sasaran Strategis : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah :
- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
 - Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
 - Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - Melakukan pengendalian evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
 - Menggunakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;



- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD.
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;
- Percepatan adaptasi penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD dengan berkoordinasi ke BPKAD dan pelaksanaan pelatihan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Sangatta, 13 Januari 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah




NOVIARI NOOR, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.**
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Bupati Kutai Timur

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.



Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Evaluasi LKjIP	90%
2.	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Persentase Pencapaian Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	91%
3.	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	90%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 25.862.878.353	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Rp. 10.800.000.000	
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 11.975.000.000	

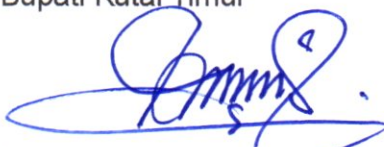
Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Bupati Kutai Timur

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur



Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.



Noviari Noor, ST., MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idham Cholid, M.Pd.
Pangkat : Pembina TK. I (IV/b)
NIP : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Noviari Noor, ST., MT.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bappeda

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

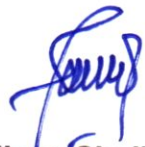
Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Sekretaris



Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004


Idham Cholid, M.Pd.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun.	100%
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.	100%
3	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD.	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD.	20%
4	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD.	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD.	100%
5	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.	Tersedianya Kebutuhan Rumah tangga SKPD.	100%
6	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor.	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor.	100%
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 600.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Rp. 16.025.478.353	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Rp. 150.000.000	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp. 3.367.400.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Rp. 3.070.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 1.150.000.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 1.500.000.000	

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Sekretaris



Noviari Noor, ST., MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671108 200212 1 004

Idham Cholid, M.Pd.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19690314 199802 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syaiful, S.Sos.
Jabatan : Penata TK.I (III/d)
NIP. : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Noviani Noor, ST., MT.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bappeda

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia



Noviani Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19690101 200212 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 2.675.000.000	

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Noviari Noor, ST., MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.

Penata TK.I (III/d)
NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyono, S.Hut., MP.
Jabatan : Pembina (IV/a)
NIP. : 19730313 199403 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Noviari Noor, ST., MT.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bappeda

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan



Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Sugiyono, S.Hut., MP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730313 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 6.750.000.000	

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Novian Noor, ST., MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671108 200212 1 004

Sugiyono, S.Hut., MP.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730313 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ripto Widargo, S.TP., MT.
Jabatan : Pembina (IV/a)
NIP. : 19721219 200003 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Noviari Noor, ST., MT.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bappeda

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam



Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Ripto Widargo, S.TP., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Rp. 2.550.000.000	

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Noviari Noor, ST., MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Ripto Widardo, S.T.P., MT.

Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marhadyn, SKM., MPH.
Jabatan : Pembina (IV/a)
NIP. : 19780328 200012 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Noviari Noor, ST., MT.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bappeda

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004


Marhadyn, SKM., MPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780328 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pendanaan.	Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD.	100%
2	Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah.	Tersusunnya Dokumen bahan RKPD.	100%
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah.	Dokumen LKJIP dan LKPJ.	100%
4	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.	Rp. 7.019.793.000	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 1.480.267.000	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 1.400.000.000	
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	Rp. 900.000.000	

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

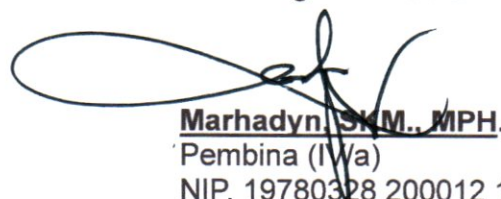
Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004



Marhadyn, SKM., MPH.
Pembina (IVa)
NIP. 19780328 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Penata (III/c)
NIP. : 19870224 201101 2 017
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Idham Cholid, M.Pd.
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP. : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan indakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sekretaris

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



Idham Cholid, M.Pd.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005

Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
Penata (III/c)
NIP. 19870224 201101 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
3	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket
4	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
5	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	133 Orang
6	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	133 Orang
7	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket
8	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket
9	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket
10	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
12	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Paket
13	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Rp. 90.000.000	
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 60.000.000	
3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 467.400.000	
4.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 50.000.000	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 750.000.000	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.100.000.000	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 150.000.000	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 710.000.000	
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 220.000.000	
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 400.000.000	
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 190.000.000	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.200.000.000	
13.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 200.000.000	
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 750.000.000	
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 400.000.000	

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 400.000.000	
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 400.000.000	
18.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 900.000.000	

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



Sekretaris

Idham Cholid, M.Pd.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19690314 199802 1 005

Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.

Penata (III/c)

NIP. 19870224 201101 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifianti, SE., MM.
Jabatan : Penata (III/d)
NIP. : 19820120 201001 2 006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Idham Cholid, M.Pd.
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP. : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sekretaris

Kasubbag. Keuangan



Idham Cholid, M.Pd.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005

Rifianti, SE., MM.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19820120 201001 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
10	Terlaksananya Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen
11	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen
12	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
13	Tersedianyan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	70 Dokumen
14	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Rp. 100.000.000	
2.	Korodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Rp. 100.000.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Rp. 100.000.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	Rp. 50.000.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	Rp. 50.000.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reailsasi Kinerja SKPD.	Rp. 100.000.000	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 100.000.000	
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Rp.12.867.223.238	
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Rp. 1.808.255.115	
10.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Rp. 750.000.000	
11.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.	Rp. 300.000.000	
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Rp. 100.000.000	
13.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.	Rp. 100.000.000	
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.	Rp. 100.000.000	

Pihak Kedua

Sekretaris



Idham Cholid, M.Pd.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19690314 199802 1 005

Sangatta, Januari 2024

Pihak Pertama

Kasubbag. Keuangan

Rifianti, SE., MM.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19820120 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. M. Agus Hari Kesuma**
Jabatan : Pjs. Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pjs. Bupati Kutai Timur

H. M. Agus Hari Kesuma

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

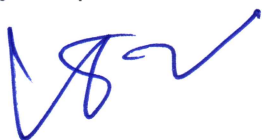
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Persentase Pencapaian Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	100%
2.	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%
3.	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik.	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 28.644.312.043	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Rp. 14.764.061.586	
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 10.829.797.799	

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pjs. Bupati Kutai Timur



H. M. Agus Hari Kesuma

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur



Noviari Noor, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M.Syaiful, S.Sos**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

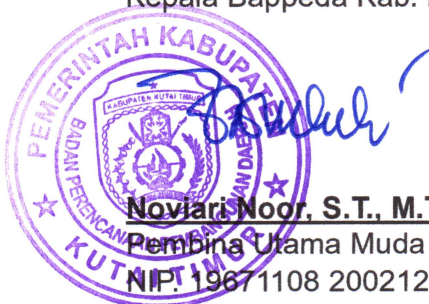
Sangatta, 4 November 2024


Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Plt. Sekretaris


Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004


M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun.	100%
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.	100%
3	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD.	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD.	100%
4	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD.	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD.	100%
5	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.	Tersedianya Kebutuhan Rumah tangga SKPD.	100%
6	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor.	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor.	100%
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 580.551.640	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Rp. 16.811.869.309	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Rp. 96.598.962	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp. 3.591.228.500	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Rp. 4.790.940.711	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 644.280.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 2.128.842.921	

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Plt. Sekretaris



Noviani Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Marhadyn, SKM., MPH.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19780328 200012 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur
Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Marhadyn, SKM., MPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780328 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pendanaan.	Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD.	100%
2	Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah.	Tersusunnya Dokumen bahan RKPD.	100%
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah.	Dokumen LKJiP dan LKPJ.	100%
4	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.	Rp. 9.954.444.937	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 1.916.698.000	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 2.283.361.624	
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	Rp. 609.557.025	

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Marhadyn, SKM., MPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780328 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Syaiful, S.Sos.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 2.674.982.610	

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ripto Widargo, S.TP., MT.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19721219 200003 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Ripto Widargo, S.TP., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Rp. 2.655.308.025	

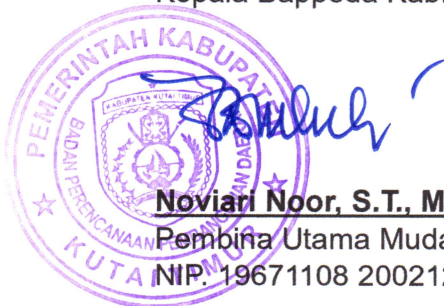
Sangatta, 4 November 2024

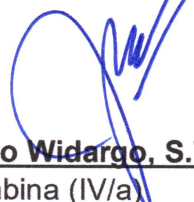
Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam


Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004


Ripto Widargo, S.TP., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sugiyono, S.Hut., MP.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19730313 199403 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

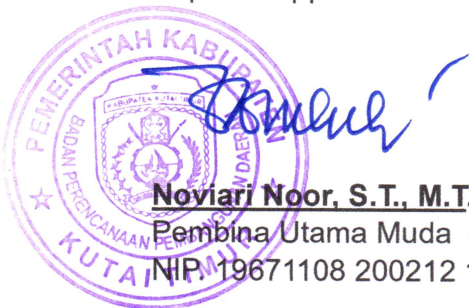
Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Insfrastruktur dan
Kewilayahan



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Sugiyono, S.Hut., MP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730313 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 5.499.507.164	

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan


Noviarri Noor, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004


Sugiyono, S.Hut., MP.

Pembina (IV/a)
NIP. 19730313 199403 1 006





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.**
Pangkat : Penata TK.I (III/d)
NIP. : 19870224 201101 2 017
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. Syaiful, S.Sos.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015

Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19870224 201101 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
3	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket
4	Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	79 Orang
5	Terlaksananya Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	133 Orang
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket
9	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket
10	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
12	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
13	Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
15	Terlaksananya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit
17	Terlaksananya Perjanjian Kontrak Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Rp. 90.000.000	
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 6.598.962	
3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 725.440.500	
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 765.788.000	
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.100.000.000	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 201.010.290	
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.079.125.128	
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 217.586.253	
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 504.189.455	
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 119.871.510	
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.270.039.500	
12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 399.118.575	
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 351.840.000	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 292.440.000	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 677.756.640	

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 224.332.500	
17.	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.226.753.781	

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



M. Syaitul, S.Sos.

Pembina (IV/a)

NIP. 19690101 200212 1 015

Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.

Penata TK. I (III/d)

NIP. 19870224 201101 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rifianti, SE., MM.**
Pangkat : Penata TK I (III/d)
NIP. : 19820120 201001 2 006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. Syaiful, S.Sos.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Kasubbag. Keuangan



M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015

Rifianti, SE., MM.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19820120 201001 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7	Tersedianya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
10	Terlaksananya Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen
11	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	72 Dokumen
12	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
13	Tersedianyan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	70 Dokumen
14	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Rp. 300.366.640	
2.	Korodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Rp. 86.050.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Rp. 46.595.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	Rp. 7.140.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	Rp. 7.140.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reailsasi Kinerja SKPD.	Rp. 60.367.000	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 72.893.000	
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Rp. 13.789.976.989	
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Rp. 1.808.255.115	
10.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Rp. 749.999.655	
11.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.	Rp. 300.000.000	
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Rp. 100.000.000	
13.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.	Rp. 36.871.838	
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.	Rp. 26.765.712	

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris

M. Syaiful S.Sos.

Pembina (IV/a)

NIP. 19690101 200212 1 015

Sangatta, 4 November 2024

Pihak Pertama

Kasubbag. Keuangan

Rifianti, SE., MM.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19820120 201001 2 006



Casecading Revisi Renstra Bappeda Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah				Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	84.55%	85.55%	35,511,000,000.00	86.55%	35,481,000,000.00	100%	14,819,000,000.00	100%	15,122,000,000.00	100%	15,508,000,000.00	100%	Bappeda	
	Terpenuhiya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah			Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	80%	87%	5,900,000,000.00	89%	4,200,000,000.00	100%	4,519,000,000.00	100%	4,719,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	Bappeda	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	5,900,000,000.00	100 %	4,200,000,000.00	100 %	4,519,000,000.00	100 %	4,719,000,000.00	100 %	5,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100 %	100 %	2,400,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen bahan RKPD	100 %	100 %	2,000,000,000.00	100 %	1,200,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,700,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ	100 %	100 %	1,500,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	Bappeda	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ	- %	- %	0,00	- %	0,00	100 %	1,019,000,000.00	100 %	1,019,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah	- %	100 %	0,00	100 %	500,000,000.00	100 %	500,000,000.00	100 %	500,000,000.00	100 %	500,000,000.00	100 %	Bappeda	
	Terpenuhiya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah			Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	83.55%	85.55%	10,090,000,000.00	84.55%	10,199,000,000.00	100%	10,300,000,000.00	100%	10,403,000,000.00	100%	10,508,000,000.00	100%	Bappeda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					Target
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPd kedalam Renstra dan Renja OPD	100 %	100 %	10,090,000,000.00	100 %	10,199,000,000.00	100 %	10,300,000,000.00	100 %	10,403,000,000.00	100 %	10,508,000,000.00	100 %	Bappeda		
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100 %	100 %	2,290,000,000.00	100 %	2,399,000,000.00	100 %	2,500,000,000.00	100 %	2,603,000,000.00	100 %	2,708,000,000.00	100 %	Bappeda		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	3,700,000,000.00	100 %	Bappeda		
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD dibidang infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	4,100,000,000.00	100 %	Bappeda		
Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik				Nilai Sakip						73	22,136,814,000.00	74	22,358,182,140.00	75	22,581,763,961.00	75	Bappeda		
	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase capaian Lakip	75%	80%	19,521,000,000.00	85%	21,082,000,000.00	-		-		-		-	Bappeda		
	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik			Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	-				100%	22,136,814,000.00	100%	22,358,182,140.00	100%	22,581,763,961.00	100%	Bappeda		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100 %	100 %	19,521,000,000.00	100 %	21,082,000,000.00	100 %	22,136,814,000.00	100 %	22,358,182,140.00	100 %	22,581,763,961.00	100 %	Bappeda		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	550,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100 %	Bappeda		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honoror serta Laporan keuangan	100 %	100 %	13,300,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	15,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pencatatan aset daerah yang di kelola oleh SKPD	100 %	20 %	76,000,000.00	100 %	87,000,000.00	100 %	150,000,000.00	100 %	76,000,000.00	100 %	100,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100 %	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	650,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	100 %	1,460,000,000.00	100 %	1,460,000,000.00	100 %	2,436,814,000.00	100 %	1,497,182,140.00	100 %	1,731,763,961.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	- %	- %	0.00	100 %	800,000,000.00	- %	0.00	100 %	1,600,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	100 %	100 %	935,000,000.00	100 %	935,680,000.00	100 %	1,300,000,000.00	100 %	935,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	100 %	Bappeda	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	2,550,000,000.00	100 %	1,550,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	2,000,000,000.00	100 %	1,500,000,000.00	100 %	Bappeda	

Sangatta, 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Kutai Timur


NOVIARI NOOR, ST.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671108 2002121004





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
INSPEKTORAT

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Telp / Fax (0549) 2029428
SANGATTA

Sangatta, 19 Februari 2024

Kepada

Nomor : 700.1.2.1/138/ITKAB.1R3

Sifat : Penting.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur di -

Sangatta

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 000.1.2.3/
/ITKAB.SET Tanggal 26 Januari 2024

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi AKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP ini adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

f. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Badan yaitu penyusunan kebijakan, pemantauan evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan, Pelaksanaan Tugas dukungan teknis perencanaan dan

pengendalian pembangunan, mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda berada pada posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, Bappeda sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan swasta/masyarakat. Disisi lain, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah multi sektor sesuai bidang bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

g. Gambaran Umum Implementasi AKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan

disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 **belum pernah** dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur.

2. KONDISI HASIL EVALUASI

a. Kondisi

1) Evaluasi Perencanaan Kerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar **30,00** memperoleh nilai atau skor sebesar **21,30** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh; nilai **6,00** dari nilai maksimal 6,00,

- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting); memperoleh nilai **6,30** dari nilai maksimal 9,00.
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; memperoleh nilai **9,00** dari nilai maksimal 15,00.

2) Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar **20,00** memperoleh nilai atau skor sebesar **14,40** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan; memperoleh nilai **4,00** dari nilai maksimal 4,00.
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; memperoleh nilai **5,40** dari nilai maksimal 6,00
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien; memperoleh nilai **5,00** dari nilai maksimal 10,00

3) Evaluasi Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar **10,00** memperoleh nilai **6,10** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja; memperoleh nilai **1,80** dari nilai maksimal 2,00
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya an/penyempurnaannya; memperoleh nilai **1,80** dari nilai maksimal 3,00

- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya ; memperoleh nilai **2,50** dari nilai maksimal **5,00**

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar **20,00** memperoleh nilai **13,00** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan; memperoleh nilai **3,20** dari nilai maksimal **4,00**
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; memperoleh nilai **4,80** dari nilai maksimal **6,00**
- c) Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) memperoleh nilai **5,00** dari nilai maksimal **10,00**

5) **Capaian Kinerja**

Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar **20,00** memperoleh nilai **11,20** dengan rincian sebagai berikut :

- a) Capaian Kinerja Sasaran telah dilaksanakan; memperoleh nilai **7,20** dari nilai maksimal **12,00**
- b) Capaian Kinerja lainnya secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; memperoleh nilai **4,00** dari nilai maksimal **8,00**

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **66,00 (Enam Puluh Enam)** atau dengan predikat penilaian **B (Baik)**, *Akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru*

dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022	Nilai 2023	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30,00	0,00	21,30	-
2	Pengukuran Kinerja	20,00	0,00	14,40	-
3	Pelaporan Kinerja	10,00	0,00	6,10	-
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,00	0,00	13,00	-
5	Capaian Kinerja	20,00	0,00	11,20	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	0,00	66,00	-
	Kategori Penilaian		-	B	-

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka disarankan kepada Saudara agar:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

Komponen 1c

Pada komponen perencanaan kinerja untuk agar disusun dan di pantau sesuai dengan perencanaan kinerja.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

Komponen 2c

Pada komponen pengukuran kinerja agar sepenuhnya menjadi dasar dalam pemberian Reward

dan Punishment serta penyesuaian (Refocusing) Organisasi dalam mencapai kinerja.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

Komponen 3b dan 3c

Pada komponen pelaporan kinerja agar Menyusun pelaporan kinerja yang menggambarkan kriteria, standar kualitas pencapaian kinerja yang telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja pada organisasi tahun berikutnya.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen 4c

Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilakukan secara berkala oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bab II Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP diinstansinya masing-masing setiap tahun*".

5. Komponen Capaian Akuntabilitas Kinerja

Komponen 5b

Pada komponen capaian akuntabilitas kinerja lainnya agar kriteria untuk capaian kinerja sasaran tahun berikutnya dapat ditingkatkan serta informasi-informasi yang disajikan dapat diandalkan untuk capaian akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

c. Penutup

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam upaya menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


Plt. Inspektur,
Faukur Rozak, S.Ag., CGCAE
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19691222 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan) di-**Sangatta**
2. Arsip